

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis selama 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting juga dapat dikatakan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi gizi buruk terlihat setelah balita berumur 2 tahun. Dikarenakan kekurangan asupan gizi yang terjadi pada balita sejak didalam kandungan (Kalla, 2017). Balita dengan gizi buruk memiliki tingkat kecerdasan yang kurang, rentan terhadap penyakit (Febriani Dwi Bella, 2019). Nantinya akan menghambat pertumbuhan kehidupan ekonomi, serta meningkatnya kemiskinan.

Rendahnya tingkat kecukupan energi, protein, serta berat badan lahir rendah merupakan faktor resiko penyebab stunting. Salah satu daerah yang masih mengalami masalah stunting adalah Kota Depok. Dari hasil Studi Status Gizi Balita (SSGI) 2021 angka stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen. (Kemenkes, 2021) berdasarkan data di Jawa Barat sendiri tercatat ada 24,5 % balita yang terkena stunting. Dari tahun 2016 sampai 2020 menurut data Dinkes Depok prevalensi stunting tergolong fluktuatif, pada tahun 2020 mencapai 5.718 anak.

Hal tersebut masih menjadi perhatian pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting. Salah satu upaya pemerintah Kota Depok dalam mengatasi stunting adalah dengan melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama 3 bulan kepada kelompok sasaran, program 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000) HPK, serta program TTD (Tablet Tambah Darah) kepada kelompok rawan seperti remaja putri. Adapun arah kebijakan perbaikan gizi sesuai Perpres No 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN adalah peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan. Maka diperlukan pemantauan status gizi setiap tahun untuk mengukur kinerja program gizi di tingkat kota.

Dilihat dari data di lapangan prevalensi stunting di Kota Depok cenderung fluktuatif, pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya melakukan usaha serta

upaya yang signifikan dalam mengatasi stunting. Berbagai upaya yang dilakukan harus diiringi dengan implementasi yang baik di lapangan, dilihat dari angka stunting yang masih fluktuatif dari berbagai program yang dijalankan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi stunting. Adapun peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Depok dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sistem Kesehatan Daerah merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Depok dalam mengatasi permasalahan kesehatan salah satunya stunting.

Keberhasilan suatu program yang telah dicanangkan didasari oleh berbagai aspek salah satunya adalah keinginan politik dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang menjadi tujuan di program tersebut, dalam hal ini stunting. Keinginan politik merupakan kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan (Brinkerhoff, 2010). Political Will atau Keinginan politik yang diartikan sebagai “niatan pemimpin” untuk melakukan hal hal yang dianggap perlu untuk kebaikan Bersama dalam jangka Panjang. Pada prinsipnya menurut Brinkerhoff (2010) terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan untuk menganalisis keinginan politik pemerintah yaitu 1) inisiatif pemerintah; 2) prioritas program; 3) mobilisasi para pihak; 4) komitmen public dan alokasi sumberdaya; 5) keberlanjutan usaha; 6) belajar dan berusaha. Jika indikator tersebut dapat dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dalam aspek keinginan politik sudah sesuai. Aspek keinginan politik dalam menyusun program terkait suatu permasalahan khususnya stunting menjadi penting karena berkaitan dengan aspek lain yaitu pembangunan manusia di suatu wilayah.

Pembangunan manusia berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi masyarakat melalui kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan tersebut harus didukung dari berbagai aspek mulai dari aspek finansial, pemerataan pelayanan kesehatan, meningkatnya status kesehatan, gizi ibu dan anak, peningkatan pengendalian penyakit, meningkatnya akses dan mutu dasar pelayanan kesehatan dan rujukan hingga terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan (Mastaldiah, 2020).

Masyarakat yang berdaya dalam bidang kesehatan dapat mengendalikan diri terkait keputusan dan tindakan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatannya (Pramudyani dkk, 2019). Pemberdayaan kesehatan di masyarakat pada hakekatnya merupakan upaya mandiri dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam indentifikasi masalah, perencanaan, dan mencari solusi dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas serta peran LSM dan tokoh masyarakat (Kemenkes RI, 2015). Pembangunan kehidupan manusia pada aspek gizi masyarakat bertujuan untuk dapat meningkatkan kesehatan dan gizi pada masyarakat agar kehidupannya lebih baik pada tingkat individu maupun tingkat keluarga. Peningkatan jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan penguatan sistem kesehatan serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Salah satu saranan utama dalam mencapai pelayanan kesehatan optimal, yang tergolong dalam upaya preventif dan promotif (UU No 23 Tahun 1992). Kendatipun demikian, undang - undang telah mengatur hal tersebut disertai dengan berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Namun, masih banyak permasalahan gizi yang terjadi di daerah khususnya masalah stunting.

Dari data diatas menunjukkan masalah stunting di Kota Depok masih fluktuatif dan upaya pemerintah Kota Depok juga belum sepenuhnya melakukan usaha serta upaya dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, melalui realitas dan dukungan data menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Keinginan Politik Pemerintah Kota Depok Dalam Mengatasi Stunting”.

I.2 Rumusan Masalah

Aspek pembangunan manusia dalam lingkup kesehatan merupakan salah satu upaya yang harus menjadi prioritas karena berkaitan dengan percepatan pembangunan suatu wilayah (Mirza, 2012) Salah satu aspek kesehatan yang menjadi prioritas adalah stunting. Menurut data SSGI tahun 2021 angka stunting secara nasional turun sebesar 1,6 persen per tahun menjadi 24,4 persen (Kemenkes RI, 2021) namun, angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan

ambang batas yang ditentukan oleh WHO yaitu 20 persen. Diterbitkannya Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Stunting merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan stunting di Indonesia.

Berdasarkan data di Jawa Barat sendiri tercatat ada 24,5 % balita yang terkena stunting. Dari tahun 2016 sampai 2020 menurut data Dinkes Depok prevalensi stunting cenderung turun namun masih fluktuatif, pada tahun 2020 mencapai 5.718 anak (Dinkes Depok, 2020). Sejauh ini terdapat beberapa program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Depok dalam menangani stunting, antara lain yaitu melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama 3 bulan kepada kelompok sasaran, program 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000) HPK, serta program TTD (Tablet Tambah Darah) kepada kelompok rawan seperti remaja putri.

Program pemberian makanan tambahan selama 3 bulan merupakan program yang telah dijalankan Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi stunting. Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2009 dan masih mendapatkan kendala yaitu format laporan dari Kemenkes hanya sebatas pada pelaksanaan pendistribusian PMT, serta belum seragamnya format laporan antara setiap puskesmas dan juga belum dimasukkannya komponen penting dalam kebijakan yang berpengaruh terhadap efektifitas program ini seperti data, sumber daya dan sasaran (Nurmadinisia, 2012). Sedangkan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan merupakan program penting yang menjadi salah satu program yang menjadi prioritas di Kota Depok, dalam implemetasinya program ini masih menemui kendala seperti kurangnya anggaran dan sumber daya manusia dalam bidang gizi di setiap puskesmas (Maulana, 2020). Program pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) merupakan program yang rutin diselenggarakan Pemerintah Kota Depok sebagai tindakan preventif pencegahan stunting, Namun, sama seperti program lainnya program Tablet Tambah Darah (TTD) ini juga menemui beberapa permasalahan seperti masih kurangnya peran keluarga dan pengetahuan mengenai pentingnya pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) (Dwiriani dkk, 2021).

Berbagai permasalahan yang ditemui menjadikan program yang dicanangkan belum efektif sehingga keinginan politik Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi stunting patut dipertanyakan. Pemerintah Kota Depok harus

dapat melihat dari hulu ke hilir dari pembuatan suatu kebijakan, perencanaan program, implemetasi di lapangan sampai ke monitoring serta evaluasi terkait suatu permasalahan terutama stunting. Peran aktif pemerintah dan tenaga kesehatan merupakan hal yang perlu diperhatikan agar program yang dicanangkan menjadi efektif (Mastaldiah, 2020).

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui Keinginan Politik Pemerintah Kota Depok dalam Mengatasi Stunting.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Analisis Keinginan Politik Pemerintah Kota Depok dalam Mengatasi Stunting
- b. Mengetahui Capaian Program Stunting

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Bagi Informan

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi bagi informan/masyarakat terkait Keinginan Politik Pemerintah Kota Depok dalam Mengatasi Stunting.

I.4.2 Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan data penelitian untuk dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai Keinginan Politik Pemerintah Kota Depok dalam Mengatasi Stunting.

I.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap Keinginan Politik Pemerintah Kota Depok dalam Mengatasi Stunting.